

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL**

**THE STRATEGY OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF BALI PROVINCE IN HANDLING
DISASTER DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC FROM A NATIONAL SECURITY
PERSPECTIVE**

Aida Rahma Savitri¹, Agus Wibowo², Anwar Kurniadi³, Deffi Ayu Puspito Sari⁴, Yuli
Subiakto⁵, Christine Sri Marnani⁶

UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

1072.aidarahma.rabu@gmail.com¹

Abstrak - Bencana akibat pandemi Covid-19 merupakan ancaman terhadap keamanan nasional yang harus ditanggulangi. Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan berbagai upaya termasuk pelibatan unsur adat, namun penambahan kasus terus terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi solusi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penanggulangan bencana akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan strategi Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah dilaksanakan dengan baik, terlihat dari kelima unsur strategi organisasi yang dipenuhi; 2) Hambatan pada pelaksanaan strategi penanggulangan Covid-19 terjadi pada seluruh unsur strategi, akibatnya strategi yang dilaksanakan kurang optimal; 3) Solusi yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali diantaranya adalah mempersiapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 tahun 2020 sebagai penegasan protokol kesehatan yang sebelumnya masih sebatas himbauan, penyusunan Peraturan Daerah (Perda), pemulihan ekonomi, pencegahan melalui vaksin, pembuatan aturan adat dan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) ditambah 1I (isolation). Kesimpulan penelitian ini adalah solusi strategi yang direncanakan adalah melalui pendekatan regulasi, pemulihan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan pendekatan adat.

Kata Kunci: Bencana, Pandemi, Covid-19, Strategi, Provinsi Bali

Abstract - *The disaster due to the Covid-19 pandemic is a threat to national security that must be overcome. The Provincial Government of Bali has carried out various efforts including the involvement of traditional elements, but additional cases continue to occur. This study aims to analyze the solution strategies of the Bali Provincial Government in disaster management due to the COVID-19 pandemic. This research is a qualitative descriptive study with purposive sampling method. The results showed that: 1) The implementation of the strategy of the Bali Provincial Government has been implemented properly, it can be seen from the five elements of*

organizational strategy that have been fulfilled; 2) Obstacles in the implementation of the Covid-19 coping strategy occur in all elements of the strategy, as a result the strategy being implemented is less than optimal; 3) The solutions planned by the Bali Provincial Government include preparing the Bali Governor Regulation Number 46 of 2020 as an affirmation of the health protocol which was previously limited to an appeal, preparation of Regional Regulations (Perda), economic recovery, prevention through vaccines, making customary rules and implementing 3T (testing, tracing, treatment) plus 1I (isolation). The conclusion of this research is that the strategic solutions that are planned are through the regulatory approach, economic recovery, health services, and traditional approaches.

Keywords: *Disaster, Pandemic, Covid-19, Strategy, Bali Province*

Pendahuluan

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Pasal 1 ayat (2) UU No 3/2002). Ancaman adalah setiap upaya dan aktifitas yang membahayakan eksistensi bangsa dan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud ancaman adalah usaha yang dilaksanakan secara konseptual melalui tindak politik dan/atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa. Ancaman dapat di klasifikasikan

menjadi beberapa jenis, menurut kemungkinan terjadinya, ancaman di klasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu ancaman nyata (aktual) dan tidak nyata (potensial). Bentuk ancaman nyata yaitu: Separatisme, Terorisme, Radikalisme, Konflik Komunal, Pencurian SKA, Narkoba, Bencana Alam.

Indonesia dikenal sebagai laboratorium bencana. Bencana di Indonesia sangat beragam baik bencana alam, non alam maupun sosial. Menurut Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa telah terjadi 1.659 kejadian bencana dari tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 23 Juni 2020 (DIBI, 2020). Dengan demikian, bencana menjadi ancaman yang sangat berarti terhadap kehidupan dan kesehatan manusia khususnya di Indonesia.

Fenomena ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja tanpa memberikan peringatan sebelumnya. Salah satu jenis bencana yang saat ini melanda dunia adalah wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyerang hampir di seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. COVID-19 merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang tidak stabil. COVID-19 mampu beradaptasi menjadi lebih ganas, hingga dapat mengakibatkan kematian. Untuk mengamati penyebaran virus yang terjadi, Prof. Dr. Soewarno, drh., M.Si., berpendapat bahwa virus corona jenis baru atau Novel Corona Virus (2019-ncov) yang sekarang sedang berkembang bukan merupakan sebuah hal baru, melainkan hasil dari mutasi. Virus itu serupa dengan corona yang menjadi penyebab SARS-Cov dan MERS-Cov.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 13 April 2020 secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional yang dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID19 Sebagai Bencana Nasional. Terdapat 4 poin yang menyatakan perihal tentang penetapan

COVID-19 sebagai bencana nasional, diantaranya:

- a. Bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional
- b. Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
- c. Perintah kepada Gubernur, bupati dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.
- d. Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal penetapan, yakni hari Senin tanggal 13 April 2020

Data akumulasi yang dihimpun WHO hingga 9 September 2020, mencatat sebanyak 1.449.629 orang di Indonesia telah melakukan tes dan 203.342 orang terkonfirmasi positif COVID-19. 145.200 orang (71,41%) diantaranya telah dinyatakan sembuh, namun 8.336 orang (4,1%) diantaranya meninggal dunia. Dengan data tersebut, Indonesia

menempati ranking kedua angka kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 setelah Filipina (245.126 orang). Di Asia, Indonesia menempati urutan 9 diatas China (urutan 15 dengan total kasus positif 85.146 orang) dan Malaysia (urutan 29 dengan total kasus positif 9.583 orang).

Data dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa (ECDC) menunjukkan bahwa *Case Fatality Rate* (CFR) COVID-19 di Indonesia hingga 13 Juli 2020 mengalahkan CFR di Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Jepang yaitu mencapai 4,76%. Di Asia Tenggara, Indonesia memiliki CFR tertinggi diantara negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak cukup siap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ketidaksiapan Indonesia ditunjukkan dalam berbagai hal, salah satunya adalah ketika awal kemunculan COVID-19 pemerintah tidak segera mempersiapkan segala sesuatunya.

Dilansir dari *voi.id*, setelah dilaporkan kematian pertama di luar China, Menteri Kesehatan Indonesia bereaksi dengan mengimbau seluruh pihak di dalam negeri untuk waspada, termasuk penyiagaan bandara dan

pelabuhan. Pada 20 Januari ketika dilaporkan kasus diluar China, pemerintah Indonesia menanggapi dengan mengaktifkan kembali alat pemindai suhu tubuh di seluruh pintu masuk negara, baik darat atau pun udara. Pada 23 Januari 2020, situasi di China semakin gawat hingga pemerintah China memberlakukan kebijakan *lockdown* untuk Kota Wuhan. Namun, pada 27 Januari 2020, Presiden RI, Joko Widodo, memastikan tak ada indikasi masuknya virus corona ke Indonesia. Situasi semakin memburuk hingga pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan status gawat darurat untuk wabah virus corona.

Bulan Februari, virus corona semakin tersebar luas ke berbagai negara. Namun, Indonesia tidak bersiap dan bahkan virus corona dianggap lelucon bagi pemangku kebijakan termasuk anggota dewan. Ditengah kondisi virus corona, pemerintah Indonesia justru menganggarkan 72 miliar rupiah untuk mempromosikan pariwisata Indonesia lewat buzzer di media sosial. Hal ini dilakukan untuk menangkal dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan dana 443,39 miliar rupiah sebagai insentif 30% diskon tiket

pesawat ke sepuluh tujuan wisata di Indonesia. Diskon yang diberlakukan Maret sampai Mei 2020 itu ditargetkan untuk dinikmati 25% penumpang per pesawat. Akhirnya, pada 2 Maret 2020 Presiden RI, Joko Widodo mengumumkan 2 kasus pertama di Indonesia. Keduanya tertular oleh orang Jepang yang berdansa bersama pada malam valentine dan orang Jepang tersebut dinyatakan positif COVID-19 pada 28 Februari 2020. Kondisi 2 kasus di Indonesia diketahui setelah orang Jepang tersebut menghubungi mereka dan memberitahukan keadaannya. Hal tersebut menunjukkan efektifitas intelijen bencana masih perlu ditingkatkan.

Seiring berjalannya waktu, Presiden RI mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pembentukan Komite Penanganan COVID19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dimaksudkan untuk mempercepat penanganan COVID-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional yang dilakukan beriringan. Jika sebelumnya, penanganan COVID-19 hanya dibebankan pada satu gugus tugas, maka melalui Perpres 82 tahun 2020, Komite

dibagi menjadi 3 tim yaitu Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Pengendalian dan pencegahan COVID-19 dilakukan pemerintah dalam berbagai hal, termasuk langkah preventif salah satunya adalah kontribusi media sosial sebagai edukasi masyarakat tentang COVID-19. Melalui media sosial, tindakan-tindakan untuk mencegah penularan COVID-19 disampaikan. Media sosial telah menjadi salah satu media untuk edukasi, dimulai dari banyaknya informasi dan peluang terjadinya interaksi serta arahan untuk menuju pengembangan informasi ke dalam tautan lain. Peran media sosial dalam edukasi kesehatan masyarakat, untuk sebagian besar dapat dikreditkan dengan munculnya teknologi yang memungkinkan individu untuk mempercepat penyebaran informasi terkait COVID-19. Teknologi telah menjadi fasilitator yang hebat, bahkan fungsi masyarakat telah berubah dengan teknologi. Melalui media sosial, masyarakat dengan mudah berbagi informasi terkait COVID-19. Namun dengan penambahan kasus positif COVID-19 yang cukup besar, efektifitas penggunaan media sosial dalam

pengendalian dan pencegahan COVID-19 masih belum diketahui.

Penanggulangan pandemi COVID-19 wajib dilakukan dengan strategi yang tepat dan cepat mengingat jenis virus COVID-19 yang sangat cepat penularannya. Strategi yang digunakan tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan yang diukur dari besarnya prosentase kesembuhan dan rendahnya prosentase kematian akibat COVID-19. WHO mendesak seluruh negara untuk memperkuat upaya untuk memerangi virus COVID-19 setelah dinyatakan sebagai ancaman kesehatan global itu sebagai pandemi. Direktur Jenderal WHO mengemukakan 4 strategi yang dapat diambil negara untuk mengendalikan COVID-19 yaitu persiapan, deteksi, pengurangan transmisi, dan inovasi. Selain itu, pilar kesiapsiagaan dan respon strategis 2019-nCoV meliputi 3 hal, yaitu:

- a. Membangun koordinasi internasional dan dukungan operasi dengan cepat
- b. Meningkatkan operasi kesiapsiagaan dan respons negara
- c. Mempercepat prioritas penelitian dan inovasi

Dikemukakan oleh Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, bahwa ada 3

strategi yang dirancang untuk penanggulangan bencana pandemi COVID-19 yang diibaratkan sebagai senjata trisula, yaitu:

- a. Wabah COVID-19. Yaitu bagaimana mengatasi, membatasi penularan, juga untuk memperkecil penyebaran, dan kemudian segera mempercepat penyelesaian COVID-19, sebagai *leading sector* adalah BNPB dan Kementerian Kesehatan.
- b. Jaring pengaman sosial untuk mengatasi darurat sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari COVID-19, sebagai *leading sector* adalah kementerian di bawah koordinasi Kementerian PMK, yaitu Menteri Sosial dan Menteri Desa Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- c. Survivabilitas ekonomi adalah domain dari Menteri Koordinator Perekonomian dan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasinya.

Provinsi Bali masuk kedalam Top 5 tujuan wisata dunia tahun 2019 menurut TripAdvisor. Di Asia, Bali menjadi tujuan wisata yang menempati urutan pertama mengungguli Hongkong, Tokyo, dan Seoul. Sepanjang tahun 2019, wisatawan

domestik yang berkunjung ke Bali mencapai 6.275.210 jiwa. Tentunya hal ini sangat membanggakan sebab sektor pariwisata di Bali menyumbang pendapatan yang cukup besar. Namun, mobilitas manusia dari berbagai negara sangat tinggi yang mengakibatkan Bali sangat rentan menjadi tempat penularan COVID-19.

Provinsi Bali berada di urutan 11 dari 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah kumulatif angka terkonfirmasi positif COVID-19 hingga tanggal 23 Juni 2020 bertambah 36 orang yaitu menjadi sebanyak 1.116 orang, 16 diantaranya adalah warga negara asing (WNA) (sumber data: COVID-19.go.id). Angka tersebut cukup besar, namun apabila dibandingkan dengan angka kesembuhan yang tinggi (639 orang) dan angka kematian yang rendah (9 orang), Pemerintah Daerah Provinsi Bali kemudian dianggap berhasil dalam menangani pandemi COVID-19 jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki angka kesembuhan yang lebih rendah serta angka kematian yang lebih tinggi. Bahkan, presiden Joko Widodo memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Bali atas penanggulangan COVID-19 yang dinilai

sukses. Apresiasi juga datang dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 usai ratas melalui siaran yang ditayangkan akun *YouTube* Sekretariat Presiden pada Selasa, 12 Mei 2020.

Provinsi Bali menerapkan strategi yang berbeda dengan yang dilakukan beberapa daerah di Indonesia. Berbeda dengan daerah lain yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Daerah Provinsi Bali memilih menerapkan kebijakan yang dibagi menjadi 2 kegiatan utama di desa adat yaitu kegiatan secara *niskala* (ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan dan kearifan lokal masyarakat Bali) serta kegiatan *sakala*. Selain 2 kegiatan di desa adat, pemerintah memperkuat sinergitas desa adat dengan aparat keamanan, Babinsa dan kelurahan dan juga membangun sinergitas antar bupati/wali kota di wilayah Provinsi Bali dengan melaksanakan arahan dan instruksi yang selaras dengan pemerintah pusat.

Keberhasilan pemerintah Provinsi Bali dibuktikan dengan prosentase kesembuhan mencapai 57,26% dan prosentase kematian sebesar 0,81%. Prosentase kesembuhan di Provinsi Bali berada jauh di atas prosentase nasional, begitu juga dengan prosentase kematian

yang berada jauh di bawah prosentase nasional. Tentunya hal ini sangat menarik sebab di tidak banyak Provinsi yang memiliki prestasi sebaik Provinsi Bali. Disamping itu, pelibatan pacalang sebagai bentuk kontribusi budaya dalam bencana COVID-19 menjadi kajian menarik yang membedakan Bali dengan provinsi lain. Peran serta masyarakat dan seluruh pihak dalam penanggulangan bencana akibat COVID-19 menunjukkan implementasi sistem pertahanan rakyat semesta melalui budaya.

Namun penyebaran COVID-19 di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Bahkan, pada situs resmi Satgas Penanganan COVID-19 www.covid19.go.id tanggal 11 September 2020 jumlah kumulatif angka jumlah positif COVID-19 di Provinsi Bali berjumlah 6.978 orang dan penambahan tertinggi tercatat pada 4 September 2020 dengan jumlah 196 kasus baru. Apabila sebelumnya Provinsi Bali berada di urutan 11 di Indonesia, maka pada 11 September 2020 Provinsi Bali berada di urutan 8 angka kumulatif kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Apabila kasus positif COVID-19 mengalami peningkatan tajam terusmenerus, maka dikhawatirkan menimbulkan dampak yang besar seperti

ketersediaan fasilitas kesehatan, keterbatasan pendanaan pemulihan, dan terganggunya perekonomian rakyat akibat harus menjalani proses pemulihan. Kedepan jika penerbangan internasional dan wisata sudah kembali dibuka, maka harus direncanakan skenario untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga harus menerapkan strategi yang tepat agar dapat memulihkan kembali perekonomian Provinsi Bali yang mayoritas bergantung pada sektor pariwisata.

Latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas menunjukkan indikasi ancaman nyata terhadap Keamanan Nasional, yang dapat memperlemah sistem pertahanan negara. Selaras dengan rumus bencana yaitu: $R = \frac{H}{V}$ dimana R (Risiko/ *Risk*) pada penelitian ini adalah penularan COVID-19 dari orang yang positif COVID-19 kepada orang yang masih sehat, H (Bahaya/ *Hazard*) ditunjukkan melalui tempat-tempat berkumpulnya orang seperti pasar, mall, tempat ibadah, sekolah, dan tempat kerja, V (Kerentanan/ *Vulnerability*) yaitu masyarakat yang masih sehat namun memiliki riwayat interaksi dengan orang positif COVID-19, dan C (Kapasitas/ *Capacity*) yaitu berupa

kebijakan pemerintah (*Trace, Test, dan Treatment*), peran serta RT/RW/Kepala Banjar dan Pacalang, serta peran aktif keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis solusi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penanggulangan bencana akibat pandemi COVID-19.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan menggali informasi secara akurat dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun penelitian dilaksanakan di Provinsi Bali.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana informan yang dipilih harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu telah ikut serta dalam penanggulangan bencana akibat COVID-19 di Provinsi Bali. Informan yang ditentukan secara *purposive sampling* dengan berdasar kepada model sinergitas pentahelix dalam penanggulangan bencana yang dicetuskan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

Objek pada penelitian ini adalah strategi Pemerintah Daerah Provinsi Bali

dalam penanggulangan bencana akibat pandemi COVID-19 dalam perspektif keamanan nasional yang berfokus pada kelembagaan dan sumberdaya manusia, pendanaan, perencanaan, serta legislasi.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini didasarkan pada unsur-unsur strategi menurut Sofjan Assauri (2013) diantaranya:

a. Gelanggang aktivitas/ Arena

Solusi Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai lokasi tujuan wisata adalah menuangkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 tahun 2020 menjadi regulasi paten berupa Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga melaksanakan upaya-upaya pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 berupa bantuan sosial, Padat Karya, paket sembako, dan sebagainya, ditambah dengan pemulihan sektor pariwisata Provinsi Bali. Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga menunjukkan kesiapan protokol CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment*) *Sustainability* yang

merupakan strategi dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Hal ini baik dilaksanakan karena Provinsi Bali masih berpangku pada penghasilan di sektor pariwisata.

- b. Sarana kendaraan atau *Vehicles* yang digunakan untuk dapat mencapai arena sasaran

Pemerintah ditargetkan telah siap dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 tahun 2020 yang didalamnya mengatur bahwa dalam kondisi darurat bencana, tidak ada lagi sifat himbauan, namun semua dilaksanakan dengan penegasan, pendisiplinan, dan sedikit pemaksaan. Disamping itu, masyarakat harus tetap mengutamakan protokol kesehatan, dan diawasi dengan baik oleh pemerintah baik melalui aparat pemerintah maupun aparat desa. Selain itu, pemerintah bisa berperan menyiapkan pencegahan yang efektif baik melalui vaksin dan sebagainya.

- c. Pembeda yang dibuat atau *differentiators*

Solusi pada unsur ini tertuang pada rencana jangka pendek Majelis Desa Adat Provinsi Bali yaitu terkait pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang kebenaran adanya virus Covid-19 dan cara mencegahnya. Jangka menengah, Majelis Desa Adat membuat perarem maupun edaran, dan jangka panjangnya adalah dengan membuat sistem pasca pandemi untuk pemulihan ekonomi di masyarakat.

- d. Tahapan rencana yang dilalui atau *staging*

Solusi pada unsur ini tidak jauh berbeda dengan strategi nasional yaitu melaksanakan 3T ditambah 1I yaitu meningkatkan *tracing*, *testing*, meningkatkan kapasitas rumah sakit sebagai langkah *treatment* dan melakukan karantina isolasi. Tidak lagi diperbolehkan pasien Covid-19 (termasuk OTG dan gejala ringan) untuk isolasi mandiri dirumah. Hal ini telah dilaksanakan, dibuktikan dengan penambahan lokasi karantina dari 3 tempat menjadi 11 tempat karantina bersama.

- e. Pemikiran yang ekonomis atau *economic logic*

Penambahan unsur yang berperan dalam pemberian edukasi masyarakat yaitu melalui dunia usaha. Sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, dunia usaha harus dapat membantu pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan menjadikan pelaku usaha educator di masyarakat, maka akan dapat membangun pengetahuan masyarakat mengenai Covid-19. Selain itu, edukasi juga dapat dilakukan melalui berbagai produk dengan pesan-pesan edukatif yang dapat mempengaruhi psikologis masyarakat dan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Kesimpulan

Strategi solusi yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali diantaranya adalah menyiapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 tahun 2020 disiapkan untuk mengatur bahwa dalam kondisi darurat

bencana, tidak ada lagi sifat himbauan, namun semua dilaksanakan dengan penegasan, pendisiplinan, dan sedikit pemaksaan termasuk pelaksanaan protokol kesehatan. Setelah itu, pada jangka menengah menuangkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 tahun 2020 tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda), pemulihan ekonomi berupa bantuan sosial, Padat Karya, paket sembako, dan sebagainya, ditambah dengan pemulihan sektor pariwisata Provinsi Bali yang ditunjukkan melalui kesiapan protokol CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment*) *Sustainability*. Selain itu, masyarakat juga harus tetap mengutamakan protokol kesehatan yang diawasi oleh aparat pemerintah maupun perangkat desa adat. Pemerintah persiapan pencegahan yang efektif baik melalui vaksin dan sebagainya. Dari unsur pembeda, Majelis Desa Adat Bali melakukan edukasi kepada masyarakat, pembuatan *perarem*, dan pembuatan sistem pasca pandemi

untuk pemulihan ekonomi di masyarakat. Dari unsur tahapan rencana yang dilalui, pemerintah melaksanakan 3T ditambah 1I yaitu meningkatkan tracing, testing, meningkatkan kapasitas rumah sakit sebagai langkah treatment dan melakukan karantina isolasi di 11 lokasi. Terakhir adalah dengan penambahan unsur yang berperan sebagai edukator di masyarakat yaitu melalui dunia usaha.

Rekomendasi

Rekomendasi penelitian ini untuk pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah dapat mengkombinasikan strategi pemerintah pusat dengan kearifan lokal yang ada di Provinsi Bali.
2. Diharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan-bantuan melalui pelatihan online, pemberian bantuan langsung, dan modal usaha rakyat.
3. Memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat

dan petugas lapangan agar tidak terjadi kebingungan yang disampaikan oleh Satgas Penanggulangan Covid-19.

4. Pelaksanaan *tracing* dilakukan secara komprehensif senada dengan standar WHO yaitu minimal 25-35 orang yang melakukan kontak erat pada setiap 1 kasus positif Covid-19 agar penelusuran penularan Covid-19 dapat menyeluruh.
5. *Tracing* yang komprehensif harus dilakukan dengan penambahan tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya agar tracing dapat dilakukan dengan cepat mengingat penularan Covid-19 yang sangat cepat.

Daftar Pustaka

Buku

- B Miles, Matthew dan Huberman, Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit UI: Jakarta
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). (2009).

- Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Djaali dan Pudji Muljono. (2008). *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Haynes, S. N., Richard, D. C., & Kubany, E. S. (1995). *Content Validity in Psychological Assessment: A Functional Approach to Concepts and Methods*.
- Moleong Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. (1994). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Nurjanah, dkk. (2011). *Manajemen Bencana*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Artikel dan Jurnal**
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke-3*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Kemenkes RI
- Sampurno, Muhammad Bayu Tejo, dkk. (2020). *Budaya Media*

Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi COVID-19. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 7 No. 6 (2020), pp. 529-542, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i5.15210

World Health Organization (WHO). (2020). *Coronavirus disease (COVID19) Situation Report-175*.

World Health Organization (WHO) Indonesia. (2020). *Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report-24*.

World Health Organization (WHO). (2020). 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV): *Strategic Preparedness and Response Plan*.

Website

Anonim. (2020). *Lonjakan Kasus Corona RI: dari Dua Positif hingga 893 Kasus*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327095133-20487390/lonjakan-kasus-corona-ri-dari-dua->

[positif-hingga-893-kasus](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327095133-20487390/lonjakan-kasus-corona-ri-dari-dua-positif-hingga-893-kasus) diakses pada 18 Mei 2020.

Anonim. (2020). *Data Kasus Covid-19 Indonesia*. Retrieved from <https://data.covid19.go.id/public/index.html> diakses pada 18 Mei 2020.

Anonim. (2020). *Dinas Pariwisata: Kunjungan wisman selain China ke Bali masih normal*. Retrieved from <https://disparda.baliprov.go.id/dinas-pariwisata-kunjungan-wismanselain-china-ke-bali-masih-normal/2020/02/> diakses pada 20 Agustus 2020.

Anonim. (2020). *Sri Mulyani Sebut Dana Penanganan Corona Naik Jadi Rp905 T*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200619172653-532515291/sri-mulyani-sebut-dana-penanganan-corona-naik-jadirdp905-t> diakses pada 20 Agustus 2020.

Anonim. (2020). *WHO Serukan 4 Strategi Penanganan Covid-19*. Retrieved from

- <https://koran.tempo.co/read/internasional/450981/who-serukan-4strategi-penanganan-covid-19> diakses pada 25 September 2020.
- Divianta, Dewi. (2020). *Strategi Bali Sukses Tekan Laju Penyebaran Corona COVID-19*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/regional/read/4252411/strategi-balisukses-tekan-laju-penyebaran-corona-covid-19> diakses pada 18 Mei 2020.
- Febrian, Ramdan dan Yudhistira M. (2020). *Mencatat Sejarah tentang Respons Indonesia Hadapi COVID-19*. Retrieved from <https://voi.id/bernas/4162/mencatat-sejarah-tentang-responsindonesia-hadapi-covid-19> diakses pada 29 Juli 2020.
- Tim detikcom-detiknews. (2020). *Ini Strategi Bali Berhasil Lawan Corona Tanpa PSBB*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d5012616/ini-strategi-bali-berhasil-lawan-corona-tanpa-psbb/2> diakses pada 18 Mei 2020.
- Kaya, Mehmet et al., (eds.). (2020). *Putting Social Media and Networking Data in Practice for Education, Planning, Prediction and Recommendation* (Singapore: Springer, 2020), <http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-33698-1>;
- Daniel Miller et al., eds., "Education and Young People," in *How the World Changed Social Media* (United Kingdom: UCL Press, 2016), 70–84.
- Komarudin. (2019). *Bali Masuk 5 Besar Destinasi Top Dunia 2019 dan Posisi Pertama di Asia*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3928229/bali-masuk-5besar-destinasi-top-dunia-2019-dan-posisi-pertama-di-asia> diakses pada 21 Agustus 2020.
- World Health Organization. (2010). *What is a Pandemic?* Retrieved from <https://www.who.int/csr/di>

sease/swineflu/frequently_a
sked_question

Dokumen

UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana

Permendagri Nomor 33 tahun 2006
tentang Pedoman Umum
Mitigasi Bencana

Perpres Nomor 82 tahun 2020
tentang Komisi Penanganan
Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Pemulihan
Ekonomi Nasional